

IMPLEMENTASI SKEMA POTONG GAJI DALAM PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU DI BPRS ARTHA PAMENANG CABANG MADIUN

¹Sania Amira Salsabi, ²Yulia Anggraini

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: anggraini@uinponorogo.ac.id

No Hp: 08125980607

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi skema potong gaji dalam pembiayaan Sertifikasi Guru (SERGU) di BPRS Artha Pamenang Cabang Madiun. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kebutuhan guru untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang lebih aman dan terjamin, serta adanya kesenjangan antara idealita kebijakan tunjangan sertifikasi dengan realitas di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana skema potong gaji diterapkan dalam pembiayaan sertifikasi guru, serta menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang muncul melalui analisis SWOT. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal BPRS Artha Pamenang, meliputi *account officer*, teller dan staf cs. Data sekunder diperoleh melalui profil lembaga, serta literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi skema potong gaji terbukti efektif dalam menekan risiko gagal bayar, meningkatkan kepastian angsuran, serta mendukung kesejahteraan guru. Meskipun demikian, terdapat kelemahan berupa ketergantungan pada kebijakan tunjangan pemerintah dan keterbatasan platfon pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema potong gaji merupakan strategi yang relevan dan berdaya guna bagi BPRS Artha Pamenang sekaligus berkontribusi pada literatur mengenai inovasi pembiayaan syariah di sektor pendidikan.

Kata kunci: Pembiayaan sertifikasi guru, Potong Gaji

Abstract

This study discusses the implementation of the salary deduction scheme in the financing of Teacher Certification (SERGU) at BPRS Artha Pamenang Madiun Branch. The background of this research is based on the need for teachers to obtain financing with a safer and more secure mechanism, as well as the gap between the ideality of the certification allowance policy and the reality in the field. This approach uses a descriptive qualitative approach with primary data obtained through in-depth interviews with internal BPRS Artha Pamenang, including account officers, tellers and cs staff. Secondary data is obtained through institutional profiles, as well as related literature. Data analysis techniques were carried out with an interactive model through data reduction, data presentation, and conclusion drawn, while the validity of the data was tested by triangulation of sources. The results of the study show that the implementation of the salary deduction scheme has proven to be effective in reducing the risk of default, increasing the certainty of installments, and supporting the welfare of teachers. However, there are weaknesses in the form of dependence on government allowance policies and limited financing platforms. This study concludes that the salary deduction scheme is a relevant and effective strategy for BPRS Artha Pamenang as well as contributing to the literature on sharia financing innovations in the education sector.

Keywords: *Teacher Certification, Salary Deduction Scheme, Sharia Financing*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang penting dalam keberlanjutan bangsa, sehingga kualitas dari sumberdaya manusia tenaga pendidik harus selalu ditingkatkan. Dalam proses pendidikan guru memegang peran ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Sertifikasi guru hadir sebagai bentuk profesionalitas guru dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan. Perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas.¹ Selain itu, adanya program sertifikasi sebagai sarana yang diambil pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru yang tercantum dalam UU No.14 Tahun 2005.² Namun, sering kali pelaksanaan program ini sering kali terhambat oleh masalah pendanaan, yang menjadi tantangan bagi banyak guru, terutama di daerah. Adapun masalah lain yaitu kesenjangan antara idealita atau

¹ Sitti Muthia Kuku et al., "Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru," *Journal of Economic and Business Education* 1, no. 3 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i3.21642>.

² Eliana Setyanti, "Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru yang Bersertifikasi," *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2020): 60–77, <https://doi.org/10.52220/sikip.v1i1.38>.

tersedianya sertifikasi guru sebagai jalan peningkatan kualitas pendidikan, dengan realita keterbatasan daya beli guru di lapangan. Hal tersebut menuntut adanya solusi pembiayaan yang inovatif, salah satunya melalui lembaga keuangan syariah.

Secara teoritis, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu³. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mutu pendidikan nasional. Idealnya, tunjangan profesi yang diberikan dapat mendukung stabilitas finansial guru sehingga mereka lebih fokus dalam proses mengajar. Sertifikasi ini juga diharapkan tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas guru, tetapi juga menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas pengajaran, namun, data menunjukkan bahwa banyak guru bersertifikat yang belum sepenuhnya merasakan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mereka.⁴ Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara tujuan sertifikasi yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan dengan beban finansial yang harus ditanggung guru terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan yang mampu menjembatani kesenjangan antara idealita dan realita tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Pamenang Cabang Madiun hadir dengan solusi berupa implementasi skema potong gaji dalam pembiayaan sertifikasi guru. Skema ini memungkinkan guru memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sebelum tunjangan cair, dengan mekanisme pembayaran melalui potongan gaji yang diterima. Kredit potong gaji adalah salah satu jenis pendanaan yang sedang berkembang pesat, program ini ditujukan untuk individu dengan pendapatan yang tetap, seperti guru, ASN, atau tenaga pendidik lainnya.⁵

³ Nana Surya Permana, "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru," *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Volume 11, no. 1 (2017): 2.

⁴ Saidun Hutasuhut et al., "Kesejahteraan Guru di Indonesia," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 227–35, <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>.

⁵ Hilya Khoirin Nida, "Efektivitas Program Kredit Potong Gaji BPR Bank Daerah Pati Terhadap Perangkat Desa Kabupaten Pati," *JUSAPAK: Jurnal Studi Pajak Keuangan* Volume 3, no. 2 (2025): 28.

Dari sisi teoritis, skema ini dapat dijelaskan melalui konsep manajemen risiko dan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta keberlanjutan.⁶ Namun demikian, penerapan di lapangan memunculkan berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun kesesuaian dengan kebutuhan guru. Hal ini menjadi relevan untuk diteliti agar dapat memberikan kontribusi praktis dan akademis.

Sebelum menyetujui sebuah pembiayaan, pihak BPRS akan melakukan analisis kelayakan dari calon nasabah yang akan dibiayai. Pemberian kredit kepada calon konsumen harus melewati tahap seleksi, kelayakan, proses pengajuan kredit yang diajukan setelah melalui analisis pemberian kredit serta kesepakatan.⁷ Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh nasabah, prinsip tersebut adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*.⁸ *Character*, menekankan pada integritas, kejujuran, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capacity*, berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban sesuai dengan pendapatan atau sumber penghasilannya. *Capital* merujuk pada kondisi permodalan atau aset yang dimiliki sebagai cerminan kekuatan finansial nasabah. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memberikan kepastian bagi bank. Sementara itu, *Condition of Economy* meninjau kondisi ekonomi, baik secara individu maupun makro, yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban. Dengan menerapkan 5C, bank syariah dapat meminimalisasi risiko pembiayaan sekaligus memastikan prinsip kehati-hatian tetap terjaga. Tujuan utama dari dilakukannya analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan kemampuan

⁶ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Kajian Ekonomi (Gema Insani, 2001).

⁷ Mega Rahayu Putri Samsuri et al., "Pengaruh Analisis 5C Terhadap Kelancaran Pembiayaan Kredit," *JLAGABI* Volume 10, no. 2 (2021): 89.

⁸ Yulia Anggraini, "Urgensi Karakter Dalam Analisis Murabahah di Bank Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (n.d.).

memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil yang sesuai kesepakatan dengan bank.⁹

Beberapa penelitian terdahulu mendukung relevansi penerapan analisis 5C dalam skema potong gaji pembiayaan sertifikasi guru. Analisis 5C menjadi pedoman penting bagi bank untuk menilai kelayakan nasabah, terutama pada aspek *character* dan *capacity* yang berhubungan langsung dengan kepatuhan dan kemampuan bayar. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyana dkk, menunjukkan bahwa penerapan 5C sangat dibutuhkan dalam pembiayaan syariah untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet.¹⁰ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin meneliti mengenai implementasi pembiayaan sertifikasi guru (SERGU) pada PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Persoda) Kantor Kas Paron. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pembiayaan dengan akad murabahah telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dana untuk konsumsi, investasi, dan pendidikan.¹¹ Kedua penelitian ini mengindikasikan bahwa skema potong gaji tidak hanya mempermudah bank dalam mengimplementasikan 5C, tetapi juga terbukti efektif sebagai strategi mitigasi risiko sekaligus memberikan manfaat nyata bagi nasabah.

Dari sisi teoritis, kajian ini dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan yang menyatakan bahwa lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana.¹² Teori ini mendeskripsikan bagaimana bank syariah mengelola risiko pembiayaan sekaligus memberikan akses permodalan kepada masyarakat, termasuk guru yang membutuhkan dukungan finansial. Selanjutnya, teori ini juga

⁹ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *ASY SYAR'IIYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* Volume 4, no. 2 (2019): 124.

¹⁰ Sonia Sofyana et al., "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 344–52, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>.

¹¹ Sholikhah Suprihatin, "Implementasi Pembiayaan Sertifikasi Guru (SERGU) Pada PT.BPRS Kabupaten Ngawi (PERSERODA) Kantor Kas Paron," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 02 (2024).

¹² Xavier Freixas, "Microeconomics of Banking —," *MIT Press*, 2008.

menjelaskan bagaimana mekanisme skema potong gaji dapat meningkatkan kepastian pembayaran dan menurunkan risiko gagal bayar. Bahkan, teori ini dapat memprediksi bahwa skema yang terstruktur dengan baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.¹³ Dengan demikian, kerangka teoritis ini relevan untuk menganalisis praktik pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Artha Pamenang Cabang Madiun.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan literatur yang masih terbatas terkait implementasi skema potong gaji dalam pembiayaan sertifikasi guru. Artikel ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menekankan relevansi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan berbasis potong gaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana aspek guru dapat dipastikan melalui mekanisme potong gaji, sementara aspek telat bayar dapat diminimalisasi risikonya dengan pembayaran yang dilakukan secara otomatis. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya bagi pengembangan manajemen risiko perbankan syariah serta meningkatkan kesejahteraan guru. Selain itu, kajian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lain dalam merancang produk serupa yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari pengembangan keilmuan sekaligus solusi praktis bagi permasalahan pembiayaan sertifikasi guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi skema potong gaji dalam pembiayaan sertifikasi guru (SERGU) di BPRS Artha Pamenang Cabang Madiun. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, vol. 99 (PT. Grafindo Persada, 2011).

snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁴ Adapun pemilihan teknik deskriptif dimana peneliti menuliskan gambaran yang utuh tentang objek penelitian melalui data deskriptif narasi, atau deskripsi detail dari orang, kejadian dan proses.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dengan angka, memungkinkan peneliti untuk menjelajah dimensi yang lebih luas dari realitas sosial.¹⁶ Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menganalisis praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan sertifikasi guru (SERGU) merupakan salah satu layanan yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi guru bersertifikasi. Dalam idealitas kebijakan pendidikan, sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi ideal membuat guru mencari akses pembiayaan yang aman, mudah dan sesuai dengan pendapatannya. Di sisi lain, lembaga perbankan syariah seperti BPRS Artha Pamenang memanfaatkan peluang ini dengan menghadirkan layanan pembiayaan SERGU berbasis skema potong gaji. Data lapangan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pegawai, serta observasi dalam aktifitas operasional di BPRS Artha Pamenang Cabang Madiun. Observasi dilakukan untuk memahami alur pelayanan, interaksi pegawai dengan calon nasabah, serta bagaimana prosedur pembiayaan diaplikasikan dalam praktik. Dengan demikian, peneliti dapat menangkap dinamika nyata yang terjadi dalam proses implementasi skema potong gaji pada pembiayaan sertifikasi guru (SERGU). Hasil wawancara

¹⁴ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jejak Publisher, 2018).

¹⁵ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Teori, Metode, Dan Praktek)* (IAIN Kediri Press, 2022).

¹⁶ Dr Hery Purnomo Arif Rachman, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," in *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV Saba Jaya, 2024).

dengan pihak CS menunjukkan bahwa pembiayaan SERGU dirancang khusus untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan menerima tunjangan sertifikasi secara berkala. Produk ini dinilai strategis karena menasar kelompok dengan pendapatan tetap, sehingga risiko pembiayaan relative rendah, sehingga bank lebih mudah dalam memetakan kelayakan nasabah serta memastikan kelancaran pembayaran angsuran. Skema pembayaran potong gaji dipandang sebagai mekanisme praktis yang aman, baik bagi bank maupun bagi guru. Dari sisi pelayanan, staf CS tidak hanya memberikan penjelasan awal mengenai prosedur, tetapi juga mendampingi calon nasabah mulai dari proses pengumpulan dokumen, verifikasi persyaratan hingga tahap pencairan pembiayaan.

Dari sisi pelayanan, pihak internal bank memiliki peran penting dalam mendampingi calon nasabah sejak tahap awal pengajuan hingga proses akhir pencairan pembiayaan. Mereka bertugas memberikan penjelasan mengenai ketentuan produk, membantu nasabah dalam menyiapkan persyaratan administrasi serta mengarahkan calon nasabah dalam proses penilaian kelayakan. Pendampingan ini tidak hanya mencakup pengumpulan dokumen, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan bagian pembiayaan untuk memastikan bahwa setiap berkas diverifikasi secara menyeluruh. Proses pelayanan yang terstruktur dan informatif ini menunjukkan komitmen BPRS Artha Pamenang dalam memberikan kemudahan serta meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prosedur pembiayaan. Dari sini terlihat bahwa implementasi pembiayaan SERGU berjalan melalui mekanisme pelayanan yang jelas, terarah dan responsif terhadap kebutuhan guru sebagai nasabah. Pendekatan pelayanan yang humanis dan sistem pembayaran yang aman menjadikan produk ini memiliki nilai tambah tersendiri dalam mendukung kesejahteraan sekaligus memperkuat portofolio pembiayaan bank.

Dari sisi administrasi, pembiayaan SERGU menuntut kelengkapan dokumen yang cukup jelas guna memastikan kelayakan calon nasabah. Dokumen yang dibutuhkan meliputi KTP, Kartu Keluarga, akta nikah, ijazah terakhir, slip gaji, buku tabungan, kartu ATM yang digunakan untuk menerima gaji serta sertifikat pendidik. Selain itu terdapat persyaratan tambahan berupa surat rekomendasi kepala sekolah dan surat persetujuan pasangan (jika sudah menikah). Persyaratan

yang lengkap menjadi faktor penting dalam mempercepat proses verifikasi serta mengurangi kemungkinan hambatan administratif. Kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap SOP merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank syariah dalam proses pembiayaan.¹⁷ Prosedur pengajuan pembiayaan dimulai dari penyerahan dokumen, dilanjutkan dengan proses BI Checking untuk melihat riwayat pembiayaan calon nasabah. Meskipun calon guru masih memiliki angsuran di lembaga keuangan lain, pengajuan tetap bisa dipertimbangkan selama kemampuan bayar dinilai memadai. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proses pencairan pembiayaan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, implementasi produk SERGU menunjukkan alur pelayanan yang terstruktur dan didukung oleh pendampingan aktif dari pihak internal bank sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan.

Selain wawancara dengan CS BPRS Artha Pamenang, peneliti juga melakukan wawancara dengan Account Officer (AO) guna memberikan gambaran lebih teknis mengenai mekanisme implementasi pembiayaan SERGU di BPRS. Dalam hal ini AO menjelaskan bahwa proses analisis pembiayaan untuk produk ini relatif lebih sederhana dibandingkan pembiayaan komersial lainnya, karena sumber pembayaran berasal dari tunjangan sertifikasi yang nominalnya tetap dan terjadwal. Oleh karena itu, penilaian risiko lebih fokus pada validitas data guru, kejelasan status sertifikasi, serta rekam jejak keuangan mereka di bank. AO juga menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam analisis adalah memastikan bahwa calon nasabah benar-benar memiliki hak untuk menerima tunjangan sertifikasi secara rutin. Untuk itu, pihak bank melakukan verifikasi melalui surat keputusan tunjangan, slip gaji, dan dokumen dari sekolah tempat guru tersebut mengajar. Selain itu, AO mengawasi kesesuaian antara pembiayaan dan kemampuan guru dalam membayar angsuran agar tidak menjadi beban keuangan yang berlebih.

Dalam wawancara juga terungkap bahwa pembiayaan SERGU memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi, terutama pada periode pencairan tunjangan sertifikasi. AO menyebutkan bahwa nasabah merasa terbantu dengan kemudahan

¹⁷ Moh. Ihsan Fauzi, "Keadilan Finansial Bagi Guru Pesantren: Studi Peran BMT Berbasis Komunitas," *JSHI: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 4, no. 1 (2025): 25.

prosedur dan pencairan yang cepat. Namun demikian, ada kendala yang kadang muncul, seperti keterlambatan tunjangan dari pemerintah yang dapat memengaruhi distribusi angsuran. AO menyiasati kondisi tersebut dengan meningkatkan komunikasi dengan nasabah serta memberikan pengingat pembayaran. Secara keseluruhan, AO memandang bahwa pembiayaan SERGU merupakan produk strategis yang dapat meningkatkan portofolio bank sekaligus mendukung kesejahteraan guru. Peran AO juga sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perbankan syariah.

Selain sudut pandang dari pihak bank, persepsi guru sebagai pengguna produk merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas implementasi pembiayaan SERGU di BPRS Artha Pamenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru yang mengajukan pembiayaan SERGU di BPRS menyatakan bahwa skema potong gaji memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pembayaran angsuran. Guru juga menilai bahwa mekanisme ini menghilangkan beban psikologis terkait dengan kewajiban membayar angsuran secara manual setiap bulan, karena pembayaran dilakukan secara otomatis melalui pemotongan tunjangan sertifikasi. Dengan hal ini, guru atau nasabah tidak perlu khawatir terlambat membayar atau lupa melakukan transaksi, sehingga angsuran dapat berjalan tepat waktu tanpa adanya risiko keterlambatan. Guru juga menilai bahwa proses administrasi yang terstandarisasi memudahkan pengajuan pembiayaan. Calon nasabah diberikan panduan yang jelas mengenai persyaratan dan alur pengajuan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses penandatanganan akad. Meskipun beberapa guru menyebutkan bahwa dokumen yang harus dilengkapi cukup banyak, mereka tetap merasa bahwa prosedur tersebut wajar karena terkait kehati-hatian bank dalam memastikan kelayakan pembiayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa guru memahami kebutuhan bank untuk menjaga prinsip prudential banking serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Selain itu, guru atau nasabah memberikan apresiasi terhadap kejelasan informasi yang diberikan oleh pihak internal bank (CS dan AO) selama proses pengajuan. Penjelasan yang sistematis, bahasa yang mudah dipahami dan

pendampingan yang dilakukan oleh pegawai bank dinilai sangat membantu, terutama bagi guru yang belum pernah mengajukan pembiayaan sebelumnya. Proses verifikasi dan pencairan pembiayaan yang berlangsung dalam waktu yang relatif cepat juga menjadi poin positif yang sering disebut oleh para guru. Dalam perspektif mereka, kepastian pembayaran angsuran menggunakan skema potong gaji adalah salah satu faktor terbesar yang membuat produk ini diminati. Kepastian ini memberikan rasa stabil serta membantu guru dalam mengatur keuangan pribadi, karena angsuran otomatis menyesuaikan besaran tunjangan yang diterima. Beberapa guru juga menilai bahwa pembiayaan SERGU cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Secara keseluruhan, persepsi guru menunjukkan bahwa pembiayaan SERGU tidak hanya bermanfaat dari sisi finansial tapi juga memberikan kenyamanan psikologis dan kemudahan administratif. Hal ini memperkuat temuan bahwa implementasi skema potong gaji merupakan strategi efektif yang relevan dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi guru di wilayah Madiun.

Implementasi skema potong gaji dalam pembiayaan sertifikasi guru (SERGU) dapat dianalisis menggunakan pendekatan SWOT. Analisis SWOT menjadi sebuah strategi bisnis untuk menilai bagaimana suatu perusahaan melakukan penilaian terhadap produk yang akan dipasarkan.¹⁸ Dalam produk SERGU analisisnya yaitu, kekuatan (*strengths*). Kekuatan utama dalam implementasi skema potong gaji dalam pembiayaan sertifikasi guru (SERGU) di BPRS Artha Pamenang terletak pada sistem pembayaran yang lebih aman dan terjamin. Dengan mekanisme potong gaji, angsuran dibayarkan secara langsung dari tunjangan sertifikasi yang diterima guru sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir. Sistem ini tidak hanya memberikan kepastian kepada pihak bank, tetapi juga menghadirkan kenyamanan bagi guru karena mereka tidak perlu melakukan penyeteroran manual setiap periode angsuran. Selain itu, mekanisme ini juga mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan pembiayaan di internal bank

¹⁸ Rachmad Zainuri and Pompong Budi Setiadi, "Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis SWOT Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan," *JURNAL MANEKSI* Volume 12, no. 1 (2023): 22.

karena pembiayaan berjalan secara otomatis. Keamanan dan kepastian pembayaran inilah yang menjadi faktor kunci keberhasilan produk SERGU dalam menjaga stabilitas pembiayaan. Kekuatan lain yang dimiliki pembiayaan SERGU adalah kesederhanaan proses administrasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Persyaratan yang diminta lebih terstruktur, sehingga mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana bagi nasabah. Hal ini membantu guru yang membutuhkan dana dengan segera tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit.

Kelemahan (*weaknesses*) meskipun lebih banyak kelebihan, skema potong gaji juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan penuh pada keberlanjutan tunjangan sertifikasi yang bersumber dari pemerintah. Jika terjadi keterlambatan pencairan tunjangan, maka hal ini dapat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Selain itu, margin keuntungan yang ditetapkan bank terkadang dianggap membebani sebagian guru dengan kondisi finansial yang terbatas. Kelemahan yang lain adalah keterbatasan jumlah plafon pembiayaan yang menyesuaikan besaran tunjangan, sehingga tidak semua kebutuhan guru dapat terfasilitasi secara optimal.

Sedangkan peluang (*opportunities*) dalam pembiayaan ini yaitu, produk pembiayaan ini memiliki peluang yang cukup besar mengingat jumlah guru bersertifikasi di wilayah Madiun terus meningkatkan setiap tahunnya. Hal ini memberikan potensi pasar yang luas bagi BPRS Artha Pamenang untuk memperluas jangkauan nasabah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah semakin tinggi, sehingga mendukung produk ini. Perkembangan teknologi perbankan digital juga dapat menjadi peluang bagi bank untuk memperkuat sistem administrasi dan layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain faktor tersebut, adanya dukungan dari pemerintah melalui program sertifikasi guru juga menjadi peluang penting bagi keberlanjutan produk ini. Program tersebut menjamin bahwa guru secara rutin menerima tunjangan sertifikasi, sehingga menjadi sumber pendapatan tetap yang bisa dijadikan dasar pembayaran angsuran. Kondisi ini menciptakan rasa aman bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan, sekaligus memberikan kepastian bagi guru dalam mengatur keuangannya. Dengan dukungan dan regulasi yang jelas, bank memiliki

landasan yang kuat untuk mengembangkan produk SERGU secara lebih optimal. Hal ini membuka ruang bagi BPRS Artha Pamenang untuk terus memperluas pasar serta meningkatkan daya saing di sektor pembiayaan berbasis syariah.

Untuk ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam implementasi skema potong gaji antara lain adalah persaingan dengan lembaga keuangan yang lain, baik bank syariah maupun bank konvensional, yang menawarkan produk pembiayaan serupa dengan skema dan margin yang berbeda. Selain itu, ketidakstabilan kebijakan pemerintah terkait tunjangan sertifikasi dapat menimbulkan risiko tambahan bagi bank maupun guru. Ancaman lain adalah potensi ketidakpuasan nasabah jika bagi margin dianggap terlalu tinggi atau jika terjadi masalah teknis dalam proses pemotongan gaji, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Disamping itu, perkembangan teknologi perbankan juga menghadirkan ancaman tersendiri berupa meningkatnya kerentanan pada sistem keamanan. Selain itu, guru sebagai nasabah utama dalam produk ini memiliki tingkat literasi yang beragam, sehingga keterbatasan pemahaman terhadap layanan digital bisa menghambat efektivitas pengguna produk. Kondisi ini menuntut bank untuk tidak hanya bersaing pada aspek produk dan margin, tetapi juga dalam hal penguatan keamanan sistem serta edukasi keberlanjutan kepada nasabah. Dengan demikian pengelolaan ancaman harus dilakukan secara strategis agar produk pembiayaan SERGU tetap berkelanjutan kompetitif.

Secara keseluruhan, pembiayaan SERGU menunjukkan kinerja operasional yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi guru sebagai penerima manfaat tunjangan sertifikasi. Produk ini berpotensi menjadi portofolio pembiayaan yang stabil bagi BPRS Artha Pamenang, sepanjang bank terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri perbankan syariah yang semakin kompetitif.

Temuan lapangan mengungkap bahwa implementasi pembiayaan SERGU di BPRS Artha Pamenang bertumpu pada tiga faktor operasional utama yang memengaruhi efektifitas produk, yaitu kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, dan pendampingan intensif dari internal bank. Ketiga komponen ini tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk sebuah rangkaian kerja yang memastikan bahwa setiap

proses pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan lembaga dan kebutuhan nasabah. Pertama, kelengkapan dokumen berperan sebagai awal yang menentukan kelancaran proses pengajuan. Pegawai bank menekankan bahwa bentuk dokumen yang lengkap dan valid memudahkan proses verifikasi serta mengurangi risiko administrasi. Dalam praktiknya, banyak guru yang awalnya belum memahami pentingnya dokumen pendukung seperti SK sertifikasi, riwayat penerimaan tunjangan, atau slip gaji. Oleh karena itu, bank menyediakan daftar persyaratan yang rinci agar calon nasabah memiliki gambaran yang jelas mengenai kebutuhan administrasi.

Kedua, kepatuhan prosedur memberikan struktur kerja yang memastikan bahwa semua tahap berjalan konsisten dengan standar operasional bank. Prosedur yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi mekanisme control mutu dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan mengikuti prosedur secara sistematis, pegawai bank dapat memetakan kelayakan guru secara objektif dan menghindari kesalahan analisis. Dalam penelitian lapangan, terlihat bahwa disiplin terhadap prosedur membantu mempercepat proses daripada memperlambatnya, karena setiap data telah diurutkan sesuai alurnya. Ketiga, pendampingan intensif dari pegawai bank menjadi aspek paling dirasakan manfaatnya oleh guru. Pendampingan tidak hanya diberikan saat pengajuan, tetapi juga saat pengisian formular, proses survey, hingga penjelasan terkait mekanisme potong gaji. Guru yang diwawancarai mengakui bahwa pendampingan ini mengurangi kebingungan, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan istilah perbankan syariah. Pola komunikasi yang informatif dan responsive membuat nasabah merasa dihargai dan dipahami kebutuhannya.

Dengan kombinasi tiga faktor tersebut, proses pembiayaan SERGU berjalan dalam kerangka yang terukur, suportif dan efisien. Dinamika kerja ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara pegawai bank dan nasabah disetiap tahap operasionalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi yang dilakukan di BPRS Artha Pamenang Cabang Madiun, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan SERGU dengan skema potong gaji merupakan salah satu produk pembiayaan yang efektif dan relevan bagi guru penerima tunjangan sertifikasi. Produk ini dinilai relevan karena menasar segmen yang stabil dari sisi penghasilan, sehingga risiko pembiayaan relatif lebih terkendali. Dari sisi operasional, skema potong gaji memberikan kepastian pembayaran angsuran, meminimalkan risiko gagal bayar, serta menghadirkan kemudahan bagi guru karena tidak memerlukan penyetoran manual setiap bulan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada kemudahan dan menghindari beban tambahan bagi nasabah.

Proses administrasi yang terstruktur dan pendampingan dari pihak internal bank turut menjadi faktor penentu kelancaran proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan. Dengan adanya pendampingan tersebut, nasabah merasa lebih terbantu dan percaya dengan layanan BPRS. Kelengkapan dokumen persyaratan mulai dari dokumen identitas hingga surat rekomendasi, menjadi komponen penting dalam memastikan kelayakan calon nasabah. Prosedur pelayanan yang dimulai dengan verifikasi berkas, BI Checking, hingga pencairan pembiayaan menunjukkan bahwa bank memiliki alur kerja yang sistematis dalam menjaga kualitas layanan. Dari sudut pandang pengguna, guru menilai bahwa produk SERGU memberikan kemudahan dan rasa aman, meskipun beberapa diantaranya menilai bahwa jumlah dokumen yang diperlukan cukup banyak dan margin pembiayaan memerlukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan.

REFERENSI

Anggraini, Yulia. "Urgensi Karakter Dalam Analisis Murabahah di Bank Syariah Indonesia." *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (n.d.).

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Vol. 99. PT. Grafindo Persada, 2011.

- Fathor Rasyid. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Teori, Metode, Dan Praktek)*. IAIN Kediri Press, 2022.
- Freixas, Xavier. "Microeconomics of Banking —." *MIT Press*, 2008.
- Hery Purnomo, Dr, Arif Rachman. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Saba Jaya, 2024.
- Hutasuhut, Saidun, Irma Siagian, Harrington Silaban, et al. "Kesejahteraan Guru di Indonesia." *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 227–35. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>.
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* Volume 4, no. 2 (2019): 124.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher, 2018.
- Moh. Ihsan Fauzi. "Keadilan Finansial Bagi Guru Pesantren: Studi Peran BMT Berbasis Komunitas." *JSHI: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 4, no. 1 (2025): 25.
- Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Kajian Ekonomi. Gema Insani, 2001.
- Muthia Kuku, Sitti, Usman Moonti, Abdulrahim Maruwae, Radia Hafid, and Melizubaida Mahmud. "Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru." *Journal of Economic and Business Education* 1, no. 3 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i3.21642>.
- Nida, Hilya Khoirin. "Efektivitas Program Kredit Potong Gaji BPR Bank Daerah Pati Terhadap Perangkat Desa Kabupaten Pati." *JUSAPAK: Jurnal Studi Pajak Keuangan* Volume 3, no. 2 (2025): 28.
- Permana, Nana Surya. "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru." *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Volume 11, no. 1 (2017): 2.
- Samsuri, Mega Rahayu Putri, Siti Saroh, and Daris Zunaida. "Pengaruh Analisis 5C Terhadap Kelancaran Pembiayaan Kredit." *JIAGABI* Volume 10, no. 2 (2021): 89.
- Setyanti, Eliana. "Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru yang Bersertifikasi." *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2020): 60–77. <https://doi.org/10.52220/sikip.v1i1.38>.

- Sofyana, Sonia, Yeny Fitriyani, and Qurotul Aini. "Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 344–52. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>.
- Suprihatin, Sholikah. "Implementasi Pembiayaan Sertifikasi Guru (SERGU) Pada PT.BPRS Kabupaten Ngawi (PERSERODA) Kantor Kas Paron." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 02 (2024).
- Zainuri, Rachmad, and Pompong Budi Setiadi. "Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis SWOT Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan." *JURNAL MANEKSI* Volume 12, no. 1 (2023): 22.